



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 3 No.1, Agustus 2024 h. 11-26

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia

Devi Anggreni. SY, Ahmad Fuadi, Fitriyani, Muhammad Ibnu Al-Kautsar,

Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia

devi_anggreni@univbinainsan.ac.id ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id Fitriyani@univbinainsan.ac.id

mibnualkautsar@gmail.com

Abstract

Article History

Received : -04-07-2024

Revised : 13-07-2024

Accepted : 20-07-2024

The Constitutional Court (CC) plays a crucial role in safeguarding the rule of law in Indonesia by ensuring that all laws and governmental policies adhere to the country's constitution. This research explores how the CC functions as an independent guardian of the constitution, balancing power among branches of government, and protecting citizens' rights from potential abuses of power. Through a qualitative approach utilizing literature review, this study analyzes the establishment history, organizational structure, and authority of the CC to conduct judicial reviews on laws deemed unconstitutional. Findings indicate that the CC has played a pivotal role in ensuring legal consistency and constitutional justice in Indonesia. CC decisions, whether through law reviews or constitutional interpretations, have provided the necessary legal certainty for political and economic stability in the country. However, the research also identifies several challenges facing the CC, including political pressures, resource limitations, and the need to enhance compliance with CC decisions among relevant stakeholders. In conclusion, the Indonesian CC holds a vital role in upholding the rule of law by ensuring that the constitution serves as a respected foundation for all within the nation. To maintain relevance amidst evolving social and political dynamics, the CC must continue to enhance its independence as a fair and impartial judicial institution. This study contributes significantly to understanding how the CC contributes to building a democratic and just legal system in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court; rule of law; judicial review; Indonesia*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran krusial dalam menjaga kedaulatan hukum di Indonesia dengan memastikan bahwa setiap undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi negara. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang independen, menyeimbangkan kekuasaan antar cabang pemerintahan, dan melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini menganalisis sejarah pendirian MK, struktur organisasi, serta kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah memainkan peran penting dalam memastikan konsistensi hukum dan keadilan konstitusional di Indonesia. Keputusan-keputusan MK, baik dalam bentuk pengujian undang-undang maupun interpretasi konstitusi, telah memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi stabilitas politik dan ekonomi di negara ini. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh MK, termasuk tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan perlunya meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan MK dari pihak-pihak terkait. Kesimpulannya, MK Indonesia memiliki peran yang vital dalam menegakkan kedaulatan hukum dengan memastikan bahwa konstitusi menjadi landasan yang dihormati oleh semua pihak di dalam negara. Untuk menjaga relevansinya di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, MK perlu terus meningkatkan independensinya sebagai lembaga peradilan yang adil dan netral. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana MK berperan dalam membangun sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi; kedaulatan hukum; judicial review; Indonesia.*

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam memastikan kedaulatan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang independen, MK bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menjaga konsistensi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam sistem hukum nasional. Keberadaan MK membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara dengan menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MK juga menjadi benteng terakhir dalam penegakan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak asasi manusia, dengan memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Dalam prakteknya, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam sejumlah kasus yang melibatkan konflik kepentingan antara lembaga negara. Misalnya, dalam beberapa kasus pemilihan umum, MK berfungsi sebagai penyelesai sengketa yang adil dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, MK juga telah berperan dalam menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945, seperti dalam kasus judicial review terhadap undang-undang yang dianggap merugikan kepentingan publik atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Namun, tantangan dalam peran Mahkamah Konstitusi tidak sedikit. Kerap kali MK menghadapi tekanan politik dan kritik dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil. Meski begitu, independensi dan integritas MK dalam menjalankan tugasnya tetap menjadi kunci dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Dukungan publik dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta rule of law menjadi faktor penting yang memungkinkan MK untuk terus berfungsi sebagai penjaga kedaulatan hukum di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga, yang memberikan landasan hukum bagi keberadaannya. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia," MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi, memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan pemerintah selaras dengan konstitusi. Asshiddiqie juga menegaskan bahwa MK memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, serta memberikan interpretasi konstitusi yang progresif guna melindungi hak-hak dasar warga negara.

Penelitian Andi Omara (2017) "Interpreting The Indonesian Constitutional Court Approach In Conducting Judicial Review On Cases Related To Economic And Social Rights" ditemukan bahwa salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk menilai apakah sebuah undang-undang sesuai dengan konstitusi. Jika MK menyimpulkan bahwa suatu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dianggap tidak sah secara hukum. MK memiliki wewenang final dalam menentukan keabsahan suatu undang-undang. Beberapa ahli berpendapat bahwa hal ini menunjukkan MK menerapkan judicial review yang kuat. Meskipun demikian, dalam konteks tertentu seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak ekonomi dan sosial, MK juga menerapkan judicial review yang lebih berhati-hati. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa meskipun secara konstitusional MK menerapkan judicial review yang kuat, namun dalam prakteknya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak ekonomi dan sosial, MK sering kali menerapkan judicial review yang lebih terbatas (Omara 2017).

Penulis lain seperti Kuswandi Hadji dkk, (2024) "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara" menegaskan Mahkamah Konstitusi memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hukum negara. Penelitian ini menginvestigasi bagaimana Mahkamah Konstitusi menguatkan sistem hukum tata negara dengan cara menginterpretasi konstitusi, menguji undang-undang, dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional. Studi ini menyoroti dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan serta implikasinya terhadap keadilan dan kedaulatan hukum. Melalui tinjauan literatur dan analisis studi kasus, artikel ini mengilustrasikan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan mempertahankan supremasi konstitusi dalam sistem hukum tata negara (Hadji et al. 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kedaulatan hukum di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana lembaga ini menginterpretasikan dan menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi judicial review terhadap undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjaga independensi dan integritasnya di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks, serta mengusulkan rekomendasi untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini dilakukan karena peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kedaulatan hukum di Indonesia sangat krusial, terutama dalam konteks dinamika politik dan sosial yang terus berkembang. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal utama konstitusi, memastikan bahwa setiap undang-undang dan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik dan isu-isu independensi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengusulkan rekomendasi untuk memperkuat peran lembaga ini dalam menjaga supremasi hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk mengeksplorasi peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kedaulatan hukum di Indonesia (Hasan et al. 2022). Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen-dokumen resmi lainnya. Studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi, serta menganalisis kasus-kasus konkret yang menunjukkan bagaimana lembaga ini menerapkan prinsip-prinsip konstitusional dalam praktiknya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari literatur yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kedaulatan hukum di Indonesia.

Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dipilih untuk penelitian ini karena memungkinkan untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks yang kompleks seperti kedaulatan hukum di Indonesia (Nur Hikmatul Auliya, et al. 2020). Dalam konteks yang melibatkan interpretasi hukum dan dinamika politik, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang beragam dan mendalam, seperti literatur akademik, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen-dokumen resmi terkait. Hal ini penting karena Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada tantangan yang berkaitan dengan

implementasi hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, yang dapat dikaji melalui tinjauan pustaka yang cermat.

Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif-perspektif yang berbeda dan menganalisis konteks historis, politis, dan sosial yang mempengaruhi peran Mahkamah Konstitusi. Studi pustaka juga memberikan fleksibilitas untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang relevan, sehingga memperkaya pemahaman tentang kompleksitas tantangan dan kemungkinan solusi yang dapat diajukan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga untuk mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia secara holistik.

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah metodologis yang terstruktur untuk memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kedaulatan hukum di Indonesia. Langkah pertama adalah pengumpulan data melalui studi pustaka yang komprehensif. Peneliti akan mengidentifikasi literatur akademik, buku, artikel jurnal, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk dikaji. Sumber-sumber ini akan memberikan landasan teoretis dan empiris yang diperlukan untuk memahami sejarah, perkembangan, serta isu-isu kunci yang berkaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum tata negara di Indonesia. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis mendalam terhadap isi dari setiap sumber yang terpilih. Analisis ini akan mencakup identifikasi pola-pola umum, tema-tema krusial, dan argumen-argumen yang muncul dari literatur yang dikaji. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan dan menghubungkan informasi-informasi yang ditemukan dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kedaulatan hukum (Tegor et al. 2020).

Terakhir, penelitian ini akan menghasilkan sebuah sintesis yang komprehensif dan mendalam tentang efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta implikasi keputusan-keputusan pentingnya terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman akademis dan praktis tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam memastikan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam konteks Indonesia yang dinamis.

Pembahasan

Kedaulatan Hukum: Konsep dan Pentingnya dalam Konteks Indonesia

Kedaulatan hukum adalah konsep yang mendasar dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa hukum sebagai aturan tertinggi harus ditegakkan secara adil dan merata bagi semua individu dan lembaga di dalam suatu negara (Kholish and Ulumuddin 2022). Konsep ini melibatkan prinsip bahwa tidak ada yang di atas hukum, termasuk pemerintah dan pejabat publik. Dalam konteks Indonesia, kedaulatan hukum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat hukum. Sejak reformasi, Indonesia telah meneguhkan komitmen terhadap prinsip kedaulatan hukum melalui amandemen UUD 1945, yang menguatkan lembaga-lembaga penegak hukum dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perlindungan hak-hak dasar warga negara. Kedaulatan hukum di Indonesia mengacu pada konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang harus dihormati dan ditegakkan oleh semua lembaga negara serta warga negara secara umum. Prinsip ini juga menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada

hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak-hak warga negara.

Pentingnya kedaulatan hukum terlihat dalam peranannya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten, kedaulatan hukum membantu mencegah konflik sosial dan politik yang dapat mengancam kestabilan negara. Ini memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang atau kedudukan sosialnya, tunduk pada aturan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, kedaulatan hukum tidak hanya menjadi fondasi bagi keadilan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Di Indonesia, implementasi kedaulatan hukum sering kali dihadapi dengan tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap hukum di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Tantangan ini sering kali muncul dalam bentuk korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus yang kompleks. Namun demikian, langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat kedaulatan hukum, termasuk reformasi sistem peradilan untuk memastikan independensi dan profesionalisme pengadilan dalam menegakkan hukum.

Dalam konteks globalisasi dan dinamika sosial-politik yang terus berkembang, pentingnya kedaulatan hukum di Indonesia menjadi semakin signifikan. Negara harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum yang telah ditegakkan. Kedaulatan hukum juga berperan penting dalam menjaga hubungan internasional yang baik dengan negara lain, karena menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang universal. Upaya untuk memperkuat kedaulatan hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada level nasional, tetapi juga melalui partisipasi dalam organisasi internasional dan kerja sama regional. Dengan mengadopsi standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia dan penerapan hukum yang adil, Indonesia dapat memperkuat citra negara dalam komunitas internasional. Ini juga memungkinkan negara untuk berperan aktif dalam forum-forum internasional dalam hal penegakan hukum global dan isu-isu keamanan regional.

Pentingnya kedaulatan hukum juga tercermin dalam peran lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi kepentingan publik dan menegakkan hukum dengan adil. Dengan memperkuat kapasitas dan independensi lembaga-lembaga ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dalam menegakkan kedaulatan hukum di semua sektor kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, kedaulatan hukum adalah landasan yang krusial dalam membangun negara hukum yang stabil dan demokratis. Di Indonesia, prinsip ini terus diperkuat melalui reformasi hukum, perlindungan hak-hak warga negara, dan peningkatan partisipasi dalam tata kelola global (Ngimadudin and Supriadi 2024). Dengan menjaga komitmen terhadap kedaulatan hukum, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang berdaulat, adil, dan bermartabat di mata dunia.

Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi di suatu negara (Hadji et al. 2024). Fungsi utama MK adalah memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi negara tersebut. Dengan demikian, MK bertindak sebagai penjaga konstitusi dan pemegang keadilan konstitusional dalam sistem hukum suatu negara. MK biasanya dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusional atau undang-

undang dasar suatu negara. Misalnya, di Indonesia, MK didirikan berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengatur kewenangan, struktur, dan prosedur MK untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberadaan undang-undang. Secara umum, MK bertugas untuk menjamin supremasi konstitusi dan menjaga konsistensi hukum di dalam suatu negara.

Keberadaan MK sering kali dipandang sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi modern. MK memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa MK berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak di luar batas-batas yang telah ditetapkan oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Tugas utama MK adalah melakukan *judicial review* atau pengujian terhadap undang-undang atau peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Prosedur ini memungkinkan MK untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Selain itu, MK juga dapat memberikan interpretasi konstitusi dalam kasus-kasus yang kompleks atau kontroversial, sehingga menetapkan preseden hukum yang dapat dijadikan acuan di masa depan.

Dalam banyak negara, MK sering kali terdiri dari sekelompok hakim konstitusi yang dipilih atau diangkat berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Hakim-hakim MK ini biasanya memiliki latar belakang dan keahlian dalam bidang hukum konstitusi dan hukum administrasi negara. Mereka diharapkan dapat menjalankan tugas mereka secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan lainnya. Selain melakukan pengujian terhadap undang-undang, MK juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional atau politik yang melibatkan berbagai pihak di dalam negara. Kehadiran MK membantu memelihara stabilitas politik dengan memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum dalam menyelesaikan konflik yang mungkin muncul.

Di samping fungsi utamanya dalam melakukan *judicial review*, MK juga memiliki peran edukatif dalam masyarakat. Keputusan-keputusan MK sering kali menjadi bahan pembelajaran dan diskusi dalam masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya. Ini membantu meningkatkan pemahaman publik tentang prinsip-prinsip konstitusional dan pentingnya hukum dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam sebuah negara. Selain itu, MK sering kali berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dalam sistem peradilan untuk memastikan implementasi keputusan-keputusannya. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang dijalankan oleh semua lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh MK, sehingga dapat menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan bagi semua warga negara.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi merupakan pilar yang penting dalam sistem hukum suatu negara, yang bertugas untuk menjaga konsistensi, keadilan, dan supremasi konstitusi. Peran MK tidak hanya terbatas pada fungsi pengujian undang-undang, tetapi juga mencakup pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, MK memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak-hak konstitusional di suatu negara.

Hubungan Antara Mahkamah Konstitusi dan Kedaulatan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran sentral dalam menjaga kedaulatan hukum dalam suatu negara (Hidayah et al. 2024). Hubungan antara MK dan kedaulatan hukum menjadi krusial karena MK berperan sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa

setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga legislatif atau pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi negara tersebut. Dalam konteks ini, kedaulatan hukum menegaskan bahwa tidak ada yang di atas hukum, bahkan pemerintah dan pejabat publik harus tunduk pada aturan yang sama seperti warga negara lainnya. MK dalam banyak negara berfungsi untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Proses ini memungkinkan MK untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melalui mekanisme ini, MK berperan dalam menjaga konsistensi hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah atau legislator didasarkan pada landasan hukum yang sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Dengan demikian, MK secara efektif mengukuhkan kedaulatan hukum dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus dihormati oleh semua pihak di dalam negara.

Pentingnya hubungan antara MK dan kedaulatan hukum terlihat dalam bagaimana MK memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar warga negara. Dalam berbagai putusan judicial review-nya, MK sering kali berperan dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tidak bertentangan dengan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, seperti hak atas keadilan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dengan demikian, MK tidak hanya menjaga konsistensi hukum, tetapi juga mengamankan hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Namun, hubungan antara MK dan kedaulatan hukum tidak selalu tanpa kontroversi atau tantangan. MK sering kali dihadapkan pada tekanan politik atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam keputusan-keputusannya. Tantangan ini dapat mengancam independensi MK dalam menjalankan tugasnya secara adil dan obyektif. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk mempertahankan independensinya sebagai lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh politik dan eksternal agar dapat menjaga integritasnya dalam menjaga kedaulatan hukum.

Di sisi lain, MK juga berperan dalam menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan memberikan interpretasi yang konsisten dan jelas terhadap konstitusi, MK membantu menciptakan prediktabilitas dalam aplikasi hukum di berbagai sektor kehidupan. Kejelasan ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya. Selain itu, kepastian hukum juga mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan teratur bagi aktivitas bisnis dan pembangunan. Selanjutnya, MK juga berperan dalam menguatkan demokrasi dan sistem check and balances di dalam suatu negara. Dengan melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap standar konstitusional, MK membantu memastikan bahwa kekuasaan pemerintah terdistribusi secara seimbang dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan hak-hak minoritas.

Selain itu, hubungan antara MK dan kedaulatan hukum juga mencerminkan pentingnya supremasi hukum dalam menanggulangi korupsi. MK dapat berperan dalam menegakkan hukum dan menyikapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau pengusaha swasta. Dengan memastikan bahwa undang-undang dan prinsip-prinsip anti-korupsi dijalankan secara adil dan tanpa pandang bulu, MK berkontribusi dalam memperkuat integritas institusi dan membangun budaya hukum yang bersih di dalam masyarakat. Terakhir, MK juga berperan dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi

regional. Dengan menjaga konsistensi hukum dan memberikan kepastian hukum, MK membantu memperkuat posisi negara dalam hubungan internasional. Kejelasan dalam aturan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi membantu menjaga reputasi suatu negara di dunia internasional, serta memfasilitasi kerja sama ekonomi dan politik antar-negara.

Secara keseluruhan, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan kedaulatan hukum mencerminkan pentingnya lembaga peradilan yang independen dan berwibawa dalam menjaga kestabilan politik, keadilan sosial, dan supremasi hukum dalam suatu negara. Melalui perannya sebagai penjaga konstitusi dan pemegang keadilan konstitusional, MK memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat fondasi demokrasi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi semua warga negara.

Mahkamah Konstitusi dan HAM

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh konstitusi (Seroy 2021). Salah satu fungsi utamanya adalah memastikan bahwa setiap undang-undang dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawas konstitusional yang memastikan bahwa hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak-hak politik warga negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih, juga menjadi perhatian utama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berperan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum yang dapat mempengaruhi hak politik individu. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, setiap sengketa terkait pemilu dapat diselesaikan secara adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga.

Dalam ranah sosial, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam menikmati layanan publik dan fasilitas umum (Pelokilla 2023). Hak-hak ini termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Mahkamah berperan dalam menguji undang-undang yang mungkin mendiskriminasi kelompok tertentu atau menghalangi akses mereka terhadap hak-hak ini, sehingga memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Hak ekonomi warga negara, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, juga dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus-kasus di mana undang-undang atau kebijakan ekonomi dianggap merugikan warga negara, Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan membatalkan kebijakan tersebut jika terbukti melanggar hak konstitusional. Ini memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan (Syafriyani, Susilawati, and Rivaldi 2024). Dalam banyak kasus, undang-undang atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mungkin tidak secara eksplisit mendiskriminasi, tetapi berdampak negatif pada kelompok tertentu. Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa hak-hak minoritas dilindungi dan bahwa setiap kebijakan pemerintah menghormati prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi sering kali menghadapi tantangan besar. Namun, melalui berbagai keputusan penting, Mahkamah telah menetapkan preseden yang kuat dalam perlindungan hak-hak dasar. Keputusan-keputusan ini tidak hanya mempengaruhi hukum di Indonesia, tetapi juga menjadi acuan bagi lembaga-lembaga hukum lainnya dalam menjalankan tugas mereka.

Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak dasar tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan memastikan bahwa setiap undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi membantu menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan adil. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam edukasi hukum bagi masyarakat. Melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi, Mahkamah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak ini, warga negara dapat lebih proaktif dalam mempertahankan dan menuntut hak-hak mereka.

Secara keseluruhan, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak dasar warga negara sangatlah vital. Melalui fungsi pengawasan konstitusionalnya, Mahkamah memastikan bahwa setiap individu dapat merasakan keadilan dan perlindungan hukum yang sama. Ini menciptakan fondasi yang kuat untuk demokrasi dan pemerintahan yang berkeadilan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dan Pemeliharaan Prinsip Demokrasi

Melalui pengawasan dan pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh UUD 1945 (Hadji et al. 2024). Proses ini penting untuk menjaga agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang melanggar hak-hak dasar warga negara atau mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Pengawasan ini juga membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bersifat inklusif dan adil untuk semua lapisan masyarakat. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini berarti bahwa setiap undang-undang yang disahkan oleh legislatif dan dieksekusi oleh eksekutif dapat diuji keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi. Jika ditemukan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkannya, sehingga mencegah berlakunya hukum yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (Sabrina and Khalid 2023). Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa tidak ada lembaga yang menyalahgunakan kekuasaannya atau melampaui batas kewenangan yang diatur oleh konstitusi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya otoritarianisme dan menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Salah satu contoh nyata dari peran Mahkamah Konstitusi adalah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan menguji dan membatalkan kebijakan yang melanggar hak-hak dasar, Mahkamah Konstitusi melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Ini menunjukkan komitmen Mahkamah dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa demokrasi bukan hanya kata-kata kosong.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memastikan bahwa proses pembuatan undang-undang dilakukan secara transparan dan partisipatif. Dengan mengawasi proses legislasi, Mahkamah membantu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi publik ini merupakan salah satu pilar utama demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan negara. Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi tempat terakhir bagi warga negara untuk mencari keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar oleh kebijakan pemerintah. Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam

pengujian undang-undang, Mahkamah menyediakan platform bagi individu dan kelompok untuk menantang kebijakan yang dianggap tidak adil atau diskriminatif. Ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Dalam perannya, Mahkamah Konstitusi juga memberikan panduan interpretatif bagi pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya tentang bagaimana konstitusi harus diterapkan. Putusan-putusan Mahkamah sering kali menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan hukum, membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi juga tercermin dalam pendidikan hukum. Mahkamah aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya konstitusi dan hak-hak yang diatur di dalamnya. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, Mahkamah membantu membangun masyarakat yang lebih kritis dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Sugitanata 2023).

Secara keseluruhan, pengawasan dan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi sangat vital dalam menjaga agar setiap kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh UUD 1945. Melalui peran ini, Mahkamah memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan dan Kendala dalam Pelaksanaan Peran Mahkamah Konstitusi

Pelaksanaan peran Mahkamah Konstitusi (MK) tidaklah tanpa tantangan dan kendala yang signifikan (Subakti et al. 2023). Sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam konstitusi, MK sering kali dihadapkan pada berbagai masalah yang mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh MK adalah tekanan politik dan intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun MK seharusnya beroperasi secara independen dari pengaruh politik dan eksternal, realitasnya sering kali menunjukkan bahwa keputusan-keputusan MK dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan kepentingan tertentu. Hal ini dapat mengancam integritas dan kredibilitas MK sebagai lembaga peradilan yang adil dan netral.

Selain tekanan politik, MK juga dihadapkan pada tantangan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan. Untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, MK membutuhkan tenaga hakim dan staf yang kompeten, memiliki hati nurani dan terlatih dalam bidang hukum konstitusi (Supriadi and Alisyahbana 2020). Namun, sering kali terjadi keterbatasan dalam hal anggaran yang dapat mempengaruhi kapasitas MK untuk menangani jumlah kasus yang meningkat atau untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi stafnya. Keterbatasan sumber daya ini dapat memperlambat proses penyelesaian kasus-kasus yang ada dan menghambat upaya inovasi dalam praktek peradilan konstitusional.

Tantangan lainnya adalah interpretasi yang kompleks terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi yang sering kali dapat menjadi sumber ketidakpastian. Konstitusi suatu negara mungkin terdiri dari berbagai pasal yang dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara, tergantung pada konteks dan situasi yang ada. MK diharapkan untuk memberikan keputusan yang jelas dan konsisten dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undangnya, namun proses ini tidak selalu mudah karena kompleksitas konstitusi dan

perbedaan pendapat di antara hakim-hakim konstitusi. Selain itu, perubahan politik dan sosial yang dinamis dalam masyarakat juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan peran MK. Perubahan politik seperti pergantian pemerintahan atau perubahan mayoritas parlemen dapat mempengaruhi dinamika dalam MK dan juga kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam konteks pengujian undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa MK harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini tanpa mengorbankan integritasnya sebagai penjaga konstitusi.

Tantangan lainnya adalah kepatuhan dari pihak-pihak eksekutif dan legislatif terhadap keputusan MK. Meskipun MK memiliki kewenangan untuk memutuskan kekonstitusionalan suatu undang-undang atau tindakan pemerintah, implementasi dari keputusan-keputusan tersebut dapat menjadi masalah jika tidak ada dukungan yang kuat dari pihak-pihak lainnya di dalam pemerintahan. Kepatuhan ini penting untuk menjaga supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Selain tantangan internal, MK juga dihadapkan pada tantangan eksternal yang terkait dengan kompleksitas globalisasi dan integrasi ekonomi. Kasus-kasus yang melibatkan aspek internasional atau implikasi global sering kali menuntut MK untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampaknya tidak hanya pada level nasional, tetapi juga pada tingkat internasional. Ini menunjukkan bahwa MK harus memiliki keterampilan dalam menghadapi kasus-kasus yang melintasi batas-batas nasional dan memahami implikasi hukum yang kompleks dari globalisasi.

Selain itu, tantangan dalam mempertahankan legitimasi dan otoritas MK dalam masyarakat juga menjadi isu yang penting. MK harus mampu menjaga kepercayaan publik terhadap integritasnya sebagai lembaga peradilan yang adil dan netral. Dalam konteks ini, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi yang efektif dengan publik menjadi kunci dalam memperkuat legitimasi MK. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi MK untuk terus mengembangkan strategi-strategi yang inovatif dan adaptif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini termasuk peningkatan dalam manajemen sumber daya manusia dan keuangan, penguatan kapasitas dalam interpretasi konstitusi, serta meningkatkan dialog dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Dengan cara ini, MK dapat mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapinya dan terus menjaga perannya sebagai penjaga konstitusi dan pemegang keadilan konstitusional dalam sistem peradilan suatu negara.

Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Negara Lain

Membandingkan peran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dengan negara lain menunjukkan variasi dalam struktur, kewenangan, dan pengaruhnya terhadap sistem hukum dan politik (Mikhael 2022). Di Indonesia, MK didirikan sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. MK Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap inkonstitusional serta memberikan interpretasi terhadap konstitusi dalam sengketa yang diajukan. Sebagai perbandingan, peran MK dalam beberapa negara lain dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan politik yang ada. Contohnya, di Amerika Serikat, Mahkamah Agung berperan sebagai pengadilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang federal dan keputusan pemerintah terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung AS memegang peran

yang kuat dalam interpretasi konstitusi dan sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum dan kebijakan di negara tersebut.

Di negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Prancis, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menegakkan supremasi konstitusi dengan melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diajukan (Hasibuan and Abraham 2023). Misalnya, Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional dan memastikan bahwa keputusan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konstitusi Jerman. Selain itu, peran MK dalam negara-negara berkembang seperti Brasil dan Afrika Selatan juga menunjukkan variasi dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Misalnya, Mahkamah Konstitusi Brasil, yang dikenal sebagai Supremo Tribunal Federal (STF), memiliki kewenangan yang luas untuk menafsirkan konstitusi dan memutuskan sengketa konstitusional yang kompleks. STF memainkan peran yang penting dalam menjaga stabilitas hukum dan politik di negara ini.

Secara umum, perbandingan peran MK di Indonesia dengan negara lain menunjukkan bahwa struktur dan kewenangan MK dapat bervariasi signifikan tergantung pada konteks hukum dan politik masing-masing negara. Namun, tujuan utama MK di seluruh dunia tetap sama, yaitu untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah dan undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi serta menjaga supremasi hukum dalam masyarakat. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus berlangsung dalam masyarakat global, MK di berbagai negara juga harus dapat beradaptasi dan mengembangkan strategi yang inovatif untuk mempertahankan integritasnya sebagai lembaga peradilan yang independen dan adil. Dengan demikian, perbandingan peran MK di Indonesia dengan negara-negara lain memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai pendekatan dalam menjaga supremasi konstitusi dan keadilan konstitusional di tingkat nasional maupun internasional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjamin kedaulatan hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa MK memegang peran yang sangat penting dalam menjaga konsistensi hukum dan kepastian dalam penerapan konstitusi. MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa semua undang-undang dan peraturan tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga sebagai pemegang keadilan konstitusional yang melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga legislatif.

Secara praktis, MK Indonesia telah banyak berkontribusi dalam menyeimbangkan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga negara lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Keputusan-keputusan MK, baik dalam bentuk judicial review maupun interpretasi konstitusi, telah memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, penelitian juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi oleh MK, seperti tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan perlunya meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan MK dari pihak-pihak terkait. Untuk menjaga relevansinya dalam era globalisasi dan kompleksitas masyarakat modern, MK perlu terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik serta memperkuat kapasitasnya dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penjaga konstitusi yang independen dan netral.

Secara keseluruhan, kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kunci dalam menjaga kedaulatan hukum di Indonesia. Dengan memastikan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, MK memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun sistem hukum yang adil, demokratis, dan stabil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadji, Kuswan, Adina Latifaturrohman, Dwi Lestari, Aina Sarah Hafawati, Tasya Putri Irawan, Nur Wahid Muharrom, and Deaz Aji Pratama. 2024. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3(5): 99–110. doi:10.3783/causa.v3i5.3203.
- Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, Syahril Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Cecep Ucu Rakhman, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, et al. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif." *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182> (June 23, 2024).
- Hasibuan, Rangga Hotman, and Agustom Adhika Abraham. 2023. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan." *Sovereignty* 2(4): 331–39.
- Hidayah, Nurul, Syabrina Az-Jahra, Aprillia Amanda, and Karina Yunitasari. 2024. "Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2(1): 04–08. doi:10.59435/jurdikum.v2i1.83.
- Kholish, Moh Anas, and Ilham Fitra Ulumuddin. 2022. "Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam." *Peradaban Journal of Law and Society* 1(1). doi:10.59001/pjls.v1i1.20.
- Mikhael, Lefri. 2022. "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *CREPIDO* 4(2): 148–60. doi:10.14710/crepido.4.2.148-160.
- Ngimadudin, Ngimadudin, and Supriadi Supriadi. 2024. "Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2(2): 97–108. doi:10.37092/hutanasyah.v2i2.700.
- Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, M.Si, Roushandy Asri Fardani, S.Si.,M.Pd, Jumari Ustiawaty, S.Si.,M.Si, Evi Fatmi Utami, M.Farm.,Apt, Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M.Sc, Ria Rahmatul Istiqomah, M.I.Kom, and Hardani, S.Pd.,M.Si. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu. <https://www.pustakailmu.co.id>.
- Omara, Andy. 2017. "Interpreting The Indonesian Constitutional Court Approach In Conducting Judicial Review On Cases Related To Economic And Social Rights." *Indonesia Law Review* 7(2). doi:10.15742/ilrev.v7n2.318.
- Pelokilla, Jerimas. 2023. "UD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1(1): 24–28. doi:10.60153/jocer.v1i1.11.
- Sabrina, Sarah, and Khalid Khalid. 2023. "Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia." *Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia* 9(2): 815–24.
- Seroy, Queensly Siska. 2021. "Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *LEX ADMINISTRATUM* 9(6).

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/34397> (July 13, 2024).
- Subakti, Try, Andi Low, Mohammed Vecky, and Imam Samudra. 2023. "Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3(2): 138–47. doi:10.19105/asshahifah.v3i2.11748.
- Sugitanata, Arif. 2023. "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden : Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regarding The Age Limits Of Presidential And Vice Presidential Candidates." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4(2): 127–46. doi:10.24239/qaumiyyah.v4i2.79.
- Supriadi, Supriadi, and Takdir Alisyahbana. 2020. "Islamic Diplomacy by Qolbu." *Prodising ISID* (1): 204–9. doi:10.37092/prosidingisid.v1i1.188.
- Syafriyani, Nurul, Dwi Febri Susilawati, and Kevin Rivaldi. 2024. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mempertahankan Negara Hukum Dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2(3): 90–99. doi:10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3401.
- Tegor, Alpino Susanto, Veterson Togatorop, Lod Sulivyo, and Dwi Joko Siswanto. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Penerbit Lakeisha.